

PANCASILA MEMBENTUK PENDIDIKAN KARAKTER BANGSA MELALUI PROSES PENDIDIKAN KEISLAMAN

Sumarto

STAI Ma'arif Kota Jambi

sumarto.manajemeno@gmail.com

Abstrak

Pancasila membentuk pendidikan karakter bangsa melalui proses pendidikan ke-Islaman. Pancasila adalah ideologi dasar bangsa Indonesia yang diwariskan dari para pendiri bangsa. Pancasila terdiri dari dua kata dalam bahasa Sansekerta, Panca artinya lima dan Sila berarti prinsip atau asas. Perkataan Pancasila memiliki lima sendi utama yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmata kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini semua tercantum dalam paragraf keempat dalam pembukaan UUD 1945. Pancasila harus melekat dalam kepribadian setiap manusia Indonesia. Mereka yang menjalankan Pancasila bukan sebatas hafalan di ruang kelas, akan mudah menyadari ada persinggungan yang erat antara Pancasila dan kehidupan berbangsa.

Pembangunan karakter di sekolah juga sangat terkait dengan manajemen atau pengelolaan sekolah. Pengelolaan yang dimaksud adalah bagaimana penguatan karakter nasionalisme direncanakan, dilaksanakan, dan dikendalikan dalam kegiatan-kegiatan pendidikan di sekolah secara memadai. Pengelolaan tersebut antara lain meliputi, nilai-nilai yang perlu ditanamkan, muatan kurikulum, pembelajaran, penilaian, pendidik dan tenaga kependidikan, dan komponen yang terkait lainnya dalam proses pendidikan Islam untuk menanamkan nilai-nilai tauhid sebagai pondasi kehidupan berbangsa dan bernegara, sebagaimana perjuangan Rasulullah SAW di Makkah dan Madinah.

Aktualisasi Pancasila adalah bagaimana proses nilai-nilai Pancasila benar-benar dapat tercermin dalam sikap dan perilaku seluruh warga negara mulai dari pimpinan negara, aparatur negara sampai kepada rakyat biasa. Aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara memerlukan situasi dan kondisi yang memungkinkan seluruh lapisan masyarakat yang dapat mencerminkan nilai-nilai Pancasila itu dan dapat terlihat dalam perilaku bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Kata Kunci: Pancasila, Pendidikan Karakter, Pendidikan Ke-Islaman.

Pendahuluan

Pancasila membentuk pendidikan karakter bangsa. Nilai-nilai dalam Pancasila merupakan bahagian dari proses pendidikan karakter yaitu menanamkan nilai agama, nilai sosial, nilai budaya, nilai bermusyawarah, nilai keadilan yang seharusnya ada dalam setiap proses pembelajaran di sekolah dan kehidupan bermasyarakat. Pendidikan di Indonesia merupakan upaya untuk membangun SDM yang berkarakter, sehingga tidak dipungkiri kurikulum pendidikan di Indonesia mewajibkan untuk mengimplementasikan pendidikan karakter di setiap mata pelajaran atau mata kuliah, karena Muslich mengungkapkan bahwa pendidikan karakter kunci kemajuan bangsa.¹

¹Muslich, Masnur. *Pendidikan Karakter Menjawab Tantangan Krisis Multidimensional*. Jakarta: Bumi Aksara. 2011, h. 1.

Pendidikan nasional di Indonesia memiliki tujuan dan fungsi yang sudah dirumuskan di dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang berbunyi pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Indonesia adalah sebuah negara yang luas, membentang dari Sabang sampai Merauke dengan jumlah penduduk yang padat. Dengan kekayaan alam yang berlimpah dan tingginya jumlah penduduk, secara ekonomi Indonesia menjadi pangsa pasar yang luas. Ini menjadi sebuah keuntungan yang baik, sebab Indonesia berperan strategis dalam lalu lintas perdagangan dunia. Tentunya diharapkan ini membuat perekonomian Indonesia semakin maju sehingga meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakatnya.

Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara terbentuk sebagai hasil kesepakatan politik para pendiri bangsa ketika mendirikan Indonesia yang merdeka. Pancasila hadir sebagai ideologi tengah di tengah konflik memanas ideologi kapitalisme dan komunisme. Dengan kecerdasan dan kearifan pemimpin bangsa, Pancasila tidak berorientasi individualisme maupun kolektivisme. Pancasila juga tidak menganut paham teokrasi maupun sekuler, serta berusaha ditawarkan sebagai konsep ilmiah, rasional dan kritis yang mendukung perdamaian dunia dan peningkatan kesejahteraan, keadilan serta kemakmuran rakyat Indonesia.²

Dalam perjalanannya, Pancasila mengalami banyak dinamika. Pada saat berdirinya Republik Indonesia, Pancasila ditempatkan sebagai ideologi yang mengatur kehidupan bernegara masyarakat Indonesia. Tetapi sejak Nopember 1945 sampai sebelum Dekrit Presiden 5 Juli 1959 pemerintah Indonesia menerapkan demokrasi liberal yang condong kepada Barat.

Akibat muncul ketidakpuasan, maka kemudian pemerintah mengoreksinya dengan menerbitkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang mengarah kepada kelompok berhaluan kiri atau komunisme (PKI) Pada masa Orde Baru, Indonesia kembali menerapkan Pancasila dengan penekanan kepada asas tunggal dan indoktrinasi Pancasila. Masa reformasi 1998 sampai sekarang, Pancasila terus dibumikan melalui kegiatan bela negara maupun empat pilar kehidupan berbangsa dan bernegara.

Pancasila, secara filsafat memiliki nilai yang sudah berkembang sejak Indonesia masih berbentuk kerajaan. Ketika itu nilai adat istiadat, agama, budaya menyatu dalam satu kesatuan yang membentuk kelahiran Pancasila itu sendiri.

²Mulyono, "Dinamika Aktualisasi Nilai Pancasila Dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara" Artikel, Universitas Diponegoro, 2010.

Melalui nilai agama, manusia Indonesia dididik mengenal dan mempercayai kehidupan ini membutuhkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa. Tanpa bimbingan nilai spiritualitas, maka kehidupan seorang manusia akan mengalami kegersangan dan tidak memiliki panduan hidup. Untuk itu, manusia Indonesia memiliki agama sebagai pedoman kehidupan dengan adanya kebebasan dari negara untuk memeluk agama dan kepercayaannya masing-masing. Dalam tulisan ini akan disampaikan lebih lanjut.

Pembahasan

Penerapan Pancasila dalam Kehidupan

Pancasila mengandung nilai yang bersifat kelompok seperti kemanusiaan yang adil dan beradab. Dimana setiap manusia harus memiliki rasa kemanusiaan terhadap manusia dan alam di sekitarnya. Tak ada manusia yang dapat hidup sendiri, sehingga dibutuhkan kerjasama yang terwujud dalam persatuan Indonesia. Tanpa adanya keinginan bersatu, tentu sulit bagi bangsa Indonesia mencapai impiannya sebagaimana diamanatkan konstitusi yaitu terwujudnya masyarakat Indonesia yang adil dan sejahtera.³

Hidup sebagai warga negara tentu membutuhkan partisipasi aktif sehingga kehidupan negara yang demokratis dapat terwujud dengan baik. Bagaimanapun proses pemilihan penyelenggara negara harus diperhatikan seluruh masyarakat Indonesia. Sebab mereka merupakan pemegang kebijakan dalam mengatasi segala potensi ancaman yang menghampiri perjalanan kehidupan bangsa Indonesia. Tidak dapat dilupakan juga bagaimana pentingnya membangun keadilan sosial sebagai proses membangun keharmonisan hidup berkelompok di tengah berbagai perbedaan suku, agama, ras dan antar golongan (SARA) yang ada di Indonesia.⁴

Nilai Pancasila secara umum dibagi menjadi dua yaitu nilai dasar dan nilai instrumental. Nilai dasar itu bersifat abstrak dan normatif dimana isinya belum dapat dioperasionalkan. Untuk dapat bergerak secara operasional dan eksplisit, maka dibutuhkan penjabaran ke dalam nilai instrumental seperti UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan. Dengan bersumber lima nilai dasar (Nilai Ketuhanan, Nilai Kemanusiaan, Nilai Persatuan, Nilai Kerakyatan, Nilai Keadilan) maka dapat dibuat dan dijabarkan nilai-nilai instrumental.

Dalam pandangan Moerdiono (1995/1996 dalam Mulyono, 2010) menjelaskan adanya 3 tataran nilai dalam ideologi Pancasila. Pertama, *nilai dasar*, yaitu suatu nilai prinsip yang bersifat umum, abstrak dan tetap, yang terlepas dari pengaruh perubahan waktu dan tempat, dengan kandungan kebenaran yang bagaikan aksioma. Dari segi kandungan nilainya, maka nilai dasar berkenaan dengan eksistensi sesuatu, yang mencakup cita-cita, tujuan, tatanan

³Inggar Saputra, *JPK: Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan*, Vol. 2, No. 2, Juli 2017 ISSN 2527-7057 (Online), ISSN 2545-2683 (Printed)

⁴*Ibid.*

dasar dan ciri khasnya. Nilai dasar Pancasila ditetapkan para pendiri negara yang tumbuh dari sejarah perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajahan dan berasal dari cita-cita yang ditanamkan dalam agama dan tradisi tentang suatu masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan kebersamaan, persatuan dan kesatuan seluruh warga masyarakat.⁵

Kedua, *nilai instrumental*, yaitu suatu nilai yang bersifat kontekstual. Nilai instrumental merupakan penjabaran dari nilai dasar yang merupakan arahan kinerjanya untuk kurun waktu tertentu dan untuk kondisi tertentu. Nilai instrumental ini dapat dan harus disesuaikan dengan tuntutan zaman. Namun nilai instrumental haruslah mengacu pada nilai dasar yang dijabarkannya. Penjabaran itu bisa dilakukan secara kreatif dan dinamis dalam bentuk baru untuk mewujudkan semangat yang sama, dalam batas-batas yang dimungkinkan oleh nilai dasar itu. Dari kandungan nilainya, maka nilai instrumental merupakan kebijaksanaan, strategi, organisasi, sistem, rencana, program dan proyek-proyek yang menindaklanjuti nilai dasar tersebut. Lembaga negara yang berwenang menyusun nilai instrumental adalah MPR, Presiden, dan DPR.

Ketiga, *nilai praksis*, yaitu nilai yang terkandung dalam kenyataan sehari-hari, berupa cara bagaimana rakyat melaksanakan (mengaktualisasikan) nilai Pancasila. Nilai praksis terdapat pada banyak wujud penerapan nilai-nilai Pancasila, baik secara tertulis maupun tidak tertulis, baik cabang eksekutif, legislatif, maupun yudikatif, oleh organisasi kekuatan sosial politik, organisasi kemasyarakatan, badan-badan ekonomi, pimpinan kemasyarakatan, bahkan warganegara secara perseorangan. Dari segi kandungan nilainya, nilai praksis merupakan gelanggang pertarungan antara idealisme dan realitas.

Pancasila: Penerapan Pendidikan Karakter

Pendidikan karakter merupakan usaha untuk membangun masyarakat di Indonesia khususnya pemuda, karena pemuda adalah pemimpin bangsa Indonesia di masa yang akan datang. Apabila ingin masa depan Indonesia cerah, maka bangun pengetahuan, keterampilan, dan karakter pemuda di era sekarang. Nasionalisme adalah karakter yang wajib dimiliki oleh setiap masyarakat Indonesia, karena karakter tersebut dapat menyatukan bangsa Indonesia sehingga mampu merdeka pada tahun 1945.⁶

Pendidikan karakter yang diimplementasikan di sekolah yang menerapkan pendidikan Islam menggunakan strategi agar peserta didik mampu memiliki karakter nasionalisme. Awalnya peserta didik dikenalkan dengan karakter yang berdasarkan ajaran nabi Muhammad SAW dan kepribadian bangsa Indonesia khususnya karakter nasionalisme dan juga dikenalkan tentang karakter buruk,

⁵Mulyono, "Dinamika Aktualisasi Nilai Pancasila Dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara" Artikel. Universitas Diponegoro. 2010.

⁶Pipit Widiatmaka, *JPK: Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan*, Vol. 1, No. 1, Juli 2016 ISSN 2527-7057.

selanjutnya peserta didik dituntut untuk mencintai karakter-karakter yang baik tersebut khususnya karakter nasionalisme. Tahap selanjutnya peserta didik dituntut untuk mengaplikasikan karakter-karakter tersebut khususnya karakter nasionalisme dengan selalu hidup rukun sesama teman, mengikuti upacara bendera dan lain sebagainya. Tahap terakhir peserta didik dituntut untuk membiasakan tingkah laku cinta terhadap tanah air di lingkungan sekolah maupun di lingkungan keluarga dan masyarakat.

Pancasila dalam Penerapan Pendidikan Islam

Konteks Pancasila sebagai suatu dasar filsafat negara, maka sila dalam Pancasila merupakan suatu sistem nilaisehingga hakikatnya Pancasila adalah satu kesatuan. Kelima dasar atau prinsip yang ada dalam sila-sila Pancasila saling berhubungan dan bekerja sama untuk satu tujuan tertentu sehingga dapat disebut sebagai sistem. Meskipun setiap sila dalam hakikatnya merupakan suatu asas yang memiliki fungsi sendiri-sendiri, namun tujuannya sama yaitu mencapai masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila.⁷

Aktualisasi nilai Pancasila dapat dijelaskan sebagai berikut. Pertama, sila Ketuhanan Yang Maha Esa mengandung nilai segala hal yang berkaitan dengan pelaksanaan dan penyelenggaraan negara harus dijiwai nilai Ketuhanan Yang Maha Esa. Keyakinan kepada Tuhan Yang Maha Esa merupakan kepercayaan adanya pencipta alam semesta dan isinya. Keyakinan ini dapat dibuktikan dengan pengetahuan ilmiah, kebenaran melalui kaidah logika dan berakar dari pemikiran yang sistematis.

Aktualisasi Pancasila adalah bagaimana proses nilai-nilai Pancasila benar-benar dapat tercermin dalam sikap dan perilaku seluruh warga negara mulai dari pimpinan negara, aparatur negara sampai kepada rakyat biasa. Aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara memerlukan situasi dan kondisi yang memungkinkan seluruh lapisan masyarakat yang dapat mencerminkan nilai-nilai Pancasila itu dan dapat terlihat dalam perilaku bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.⁸

M S Branson dalam Winarno⁹ tiga kompetensi dalam pendidikan kewarganegaraan yaitu *civic knowledge* (pengetahuan kewarganegaraan), *civic skill* (keterampilan kewarganegaraan) dan *civic virtue* yang meliputi *civic commitmen* dan *civic disposition*. *Civic commitmen* dengan menerima dan memiliki komitmen, sedangkan *civic disposition* adalah nilai-nilai dasar. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka *civic knowledge* dalam pembahasan tentang nasionalisme adalah pengetahuan tentang nasionalisme, *civic skill* meliputi

⁷ Ngadino, Syahrial dan Rahman,. *Pancasila Dalam Makna dan Aktualisasi*, (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2015),

⁸Darmadi, Hamid, *Urgensi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi*. (Bandung: Alfabeta, 2013)

⁹Winarno. *Peradaban Global & Pilar Kebangsaan melalui PKn*: Diperoleh 10 Maret 2013 dari www.youthfluence.com. 2012.

keterampilan peserta didik menjelaskan, menganalisis, berfikir kritis tentang nasionalisme, kemudian *civic commitmen* di sini menerima dan berkomitmen pada nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila dan UUD 1945. *Civic disposition* meliputi bahwa peserta didik didorong untuk memiliki karakter nasionalisme, patriotisme, semangat kebangsaan, religius, tanggung jawab dan lain-lain.

Zainuddin¹⁰ menjelaskan kepentingan sekolah itu tidak hanya membuat anak didik cerdas dan cerdik serta bertambah ilmu pengetahuannya, melainkan lebih pada kewajiban dalam memperbaiki tabiat anak-anak dan mencetaknya agar sesuai dengan dunia yang akan datang dan menghasilkan tujuan pendidikan sebenarnya. Sekolah inilah sebaik-bainya jalan untuk memperbaiki dan mempertinggi pergaulan suatu bangsa. Dengan demikian, manajemen sekolah merupakan salah satu media yang efektif dalam penanaman karakter. Penanaman karakter nasionalisme di sekolah merupakan salah satu wujud nyata yang dapat ditunjukkan dengan mengenang perjuangan para pahlawan, di dalam perjuangan tersebut terpendam suatu karakter yang kokoh yang dilandasi rasa cinta tanah air. Karakter nasionalisme dapat diteruskan dengan mengisi kemerdekaan yang sudah kita peroleh dan mengenang perjuangan para pahlawan lewat upacara bendera.

Sekolah berbasis pendidikan Islam di Indonesia pada dasarnya sekolah formal yang tidak hanya mengajarkan dan menanamkan nilai religius saja, tetapi juga mengajarkan dan menanamkan nilai-nilai yang berdasarkan Pancasila salah satunya adalah nasionalisme. Sekolah berbasis agama Islam saat ini dianggap oleh masyarakat awam di Indonesia merupakan sekolah yang belum mampu menciptakan (*out put*) peserta didik yang sukses karir yang bagus dan menanamkan karakter nasionalisme. Padahal banyak bukti kalau sekolah berbasis pendidikan Islam tidak hanya menciptakan peserta didik yang sukses dalam hal karir saja, namun juga mampu menanamkan karakter-karakter yang berdasarkan kepribadian bangsa Indonesia salah satunya karakter nasionalisme, seperti Abdurahman Wahid, Muhammad Natsir, Aqil Siraj, Din Syamsudin, Buya Syafi'i dan lain sebagainya.

Sekolah berbasis pendidikan Islam pada dasarnya sekolah formal yang dapat menciptakan peserta didik yang memiliki karakter religius, nasionalisme, tanggung jawab, disiplin dan lain sebagainya, sehingga tidak bisadipungkiri banyak tokoh besar alumni sekolah berbasis agama Islam menjadi negarawan, karena sekolah tersebut mampu mengimplementasikan pendidikan karkater yang terencana dan terintegrasi dengan seluruh kegiatan yang ada di sekolah.

Dengan pendidikan Islam dapat membentuk karakter. Karena karakter merupakan nilai-nilai universal perilaku manusia yang meliputi seluruh aktivitas kehidupan, baik yang berhubungan dengan Tuhan, diri sendiri, sesama

¹⁰Zainuddin Fananie, *Pedoman Pendidikan Modern*, (Solo: Tiga Serangkai Pustaka Mandiri. 2011)

manusia maupun dengan lingkungan yang terwujud dalam pikiran, sikap, perasaan, perkataan, dan perbuatan yang berdasarkan norma-norma agama, hukum, tata karma, budaya, dan adat istiadat.¹¹ Karakter akan mudah dapat dibentuk apabila sejak kecil mulai dibangun di lingkungan keluarga (informal) sehingga ketika beranjak dewasa/muda, maka karakter anak tersebut dikembangkan melalui pendidikan formal dan nonformal.

Sekolah berbasis pendidikan Islam pada dasarnya memiliki hambatan dalam membangun karakter nasionalisme peserta didik. Hambatan yang dialami oleh pendidik di sekolah tersebut ternyata adalah praktik dari sikap peserta didik yang relevan dengan teori yang menunjukkan belum membudayanya sikap dan nilai. Dalam prakteknya, upaya internalisasi wawasan kebangsaan melalui materi pelajaran PPkn menghadapi kendala bukan hanya dalam pendekatan proses pengalihan informasinya saja, melainkan juga karena belum membudayanya sikap dan nilai yang diharapkan tumbuh dalam pribadi peserta didik di masyarakat luas. Berbeda dengan pemimpin nasional terdahulu, meskipun mereka telah melalui sistem pendidikan kolonial yang tidak mengenal program untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air, ternyata mampu melahirkan pemimpin nasional yang tidak hanya kental wawasan kebangsaannya, melainkan juga merintis lahirnya bangsa Indonesia yang merdeka dan berdaulat.¹²

Kesimpulan

1. Pancasila sebagai dasar dan ideologi bangsa seharusnya bisa menjadi pedoman hidup untuk menyatukan bangsa dan menjadi solusi terhadap problematika yang sedang di hadapi oleh bangsa.
2. Pancasila adalah sumber utama proses pendidikan karakter di setiap sekolah, baik sekolah umum maupun sekolah yang menerapkan pendidikan ke-Islaman, tidak ada yang membedakan dan dikotomik, karena Rasulullah SAW berjuang demi Islam dan kesatuan kebangsaan bangsa dan negara pada waktu itu.
3. Pancasila dan masyarakat tidak bisa terpisahkan, karena setiap nilai-nilai pancasila ada disetiap sendi kemasyarakatan, yaitu nilai kehidupan beragama, nilai kehidupan sosial untuk saling membantu, toleransi, saling menghormati dan menghargai, nilai bermusyawarah untuk mufakat tanpa ada unsur kepentingan golongan yang ada hanya kepentingan bangsa dan negara, nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yaitu setiap warga negara memperoleh hak dan kewajibannya, tanpa ada deskriminasi,

¹¹Suyadi, *Strategi Pembelajaran Pendidikan Karakter*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013), h. 5-6.

¹²Assegaf Rachman, *Politik Pendidikan Nasional: Pergeseran Kebijakan Pendidikan Agama Islam dari Praproklamasi ke Reformasi*, (Yogyakarta: Kurnia Kalam, 2005)

pembedaan, terisolasi, semua dalam kesatuan Negara taat hukum dalam kebhinekaan.

4. Melalui pendidikan ke-Islaman dapat membentuk karakter kebangsaan yang nasionalis, karena berdasarkan perjuangan Rasulullah SAW berjuang untuk Tauhid Ke-Islaman, membangun masyarakat yang berkebangsaan dan bernegara ketika di Madinah untuk mengatur dan mengelola sistem kehidupan yang tentram, tertib dan damai tanpa ada unsur kejahatan bagi golongan lain, agama lain, semua sudah di bangun dalam kesepakatan bersama dalam Piagam Madinah.

Referensi

- Assegaf, Rachman. *Politik Pendidikan Nasional: Pergeseran Kebijakan Pendidikan Agama Islam dari Praproklamasi ke Reformasi*. Yogyakarta: Kurnia Kalam, hal. 2005.
- Darmadi, Hamid. *Urgensi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi*. Bandung: Alfabeta. 2013.
- Inggar Saputra, *JPK: Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan*, Vol. 2, No. 2, Juli 2017 ISSN 2527-7057 (Online), ISSN 2545-2683 (Printed)
- Mulyono, "Dinamika Aktualisasi Nilai Pancasila Dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara" Artikel. Universitas Diponegoro. 2010.
- Muslich, Masnur. *Pendidikan Karakter Menjawab Tantangan Krisis Multidimensional*. Jakarta: Bumi Aksara. 2011, hal. 1.
- Ngadino, Syahrial dan Rahman. *Pancasila Dalam Makna dan Aktualisasi*. Penerbit Andi: Yogyakarta. 2015.
- Pipit Widiatmaka, *JPK: Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan*, Vol. 1, No. 1, Juli 2016 ISSN 2527-7057.
- Suyadi. *Strategi Pembelajaran Pendidikan Karakter*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 2013, hal. 5-6.
- Winarno. *Peradaban Global & Pilar Kebangsaan melalui PKn*: Diperoleh 10 Maret 2013 dari www.youthfluence.com. 2012.
- Zainuddin Fananie. *Pedoman Pendidikan Modern*. Solo: Tiga Serangkai Pustaka Mandiri. 2011.